

**SYSTEMATIC LITERATUR REVIEW: PENGARUH TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN, TEMUAN INSPEKTORAT DAN
SISTEM KEUANGAN DESA TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DESA**

Syawaluddin

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Samudra

Korespondensi penulis: syawal.akuntansi.2022@gmail.com

Afrah Junita

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Samudra

Iqlima Azhar

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Samudra

Abstract. *The purpose of this systematic literature review is to determine the effect of financial management transparency, inspectorate findings and the village financial system on village government performance. The method of writing systematic literature review articles is the library search method which originates from online media such as Google Scholar, Mendeley and other academic media. The results of this systematic literature review are 1) financial management transparency affects the performance of the village government; 2) the inspectorate's findings affect the performance of the village government; 3) the village financial system affects the performance of the village government.*

Keywords: *Village Financial Management Transparency, Inspectorate Findings, Village Financial System, Village Government Performance*

Abstrak. Tujuan dari *systematic literature riview* ini adalah untuk mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan keuangan, temuan inspektorat dan sistem keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa. Metode penulisan artikel *systematic literatur review* ini adalah dengan metode *library search* yang bersumber dari media *online* seperti *google scholar, mendeley* dan media akademik lainnya. Hasil *systematic literature riview* ini adalah 1) transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa; 2) temuan inspektorat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa; 3) sistem keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

Kata kunci: Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa, Temuan Inspektorat, Sistem Keuangan Desa, Kinerja Pemerintah Desa

LATAR BELAKANG

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai tugas untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-Undang desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa (Purti, 2020).

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, kinerja aparatur pemerintah desa sangatlah diperlukan. Hal ini dikarenakan pemerintah desa merupakan suatu organisasi yang berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepala desa atau perangkat desa yang dimana ketika menjalankan pertanggungjawabannya, memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, serta bebas dari adanya kolusi korupsi dan nepotisme (KKN). Untuk itu, tanggungjawab dari pemerintah desa bukan lagi hanya menekankan pada proses membuat, melaksanakan, dan mewujudkan program ekonomi saja, tetapi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, ketepatan penyampaian laporan, maupun kegiatan lainnya juga harus diperhatikan (Artini et al., 2017).

Transparansi merupakan salah satu faktor terpenting demi terciptanya kinerja pemerintahan yang baik (Kushartiningsih & Riharjo, 2021). Transparansi adalah sebuah keterbukaan dimana pemerintah memberikan informasi terkait hal-hal yang perlu disampaikan ketika menjalankan tugas maupun kegiatannya. Atau dalam artian lain, informasi dari suatu organisasi mudah untuk diakses oleh semua orang, terutama bagi masyarakat individu atau kelompok yang bersangkutan dengan organisasi (Novitasari & Asyik, 2019).

Selain itu temuan inspektorat juga dapat mempengaruhi kinerja pemerintah desa. Dalam hal ini pengawasan inspektorat sangat diperlukan, hal ini dilakukan guna menghindari adanya penyelewengan terkait tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan, kita bisa mengetahui sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilakukan, dan sejauh apa penyimpangan terjadi dalam pelaksanaan kerja. Sistem keuangan desa juga dapat mempengaruhi kinerja pemerintah desa. Penerapan Sistem keuangan desa ini sangat penting karena dapat membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien. Hampir semua laporan keuangan akan di buat oleh bendahara desa (Fatchuriza, 2020).

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas maka penelitian bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan, temuan inspektorat, dan sistem keuangan desa memiliki keterkaitan yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa. Namun pada beberapa penelitian menunjukkan terdapat pengaruh negatif atau tidak berpengaruh sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan melalui *literature review* terkait, dengan Judul “Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan, Temuan Inspektorat dan Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa”.

KAJIAN TEORITIS

Kinerja Pemerintah Desa

Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang diraih oleh seseorang). Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kinerja adalah melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan tugas tanggung jawab masing-masing agar mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Purti, 2020).

Transparansi Pengelolaan Keuangan

Transparansi merupakan informasi mengenai keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat umum dengan alasan masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya publik (Annisaningrum, 2015). Transparansi merupakan prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah dalam mendapatkan informasi serta menjamin dalam mendapatkan informasi dengan mudah dan memadai (Kautsar et al., 2017).

Temuan Inspektorat

Pengawasan oleh inspektorat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan agar pemerintahan dilaksanakan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa pengawasan dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean Governebt) (Pontas, 2014). Menurut Purti (2020), Pengawasan adalah suatu cara melakukan perbandingan kinerja standar, rencana atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya untuk menetapkan apakah kinerja sesuai dengan standar tersebut dan untuk memutuskan tindakan perbaikan dibutuhkan untuk melihat bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

Sistem Keuangan Desa

Sistem keuangan desa merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (PKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi sistem keuangan desa yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan anggaran dana desa yang dimuat dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh pegawai desa tentu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aplikasi sistem keuangan desa diharapkan untuk mempermudah kinerja pegawai desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan berdasarkan prinsip-prinsip good governance yang berlaku sehingga tidak keluar dari koridor peraturan yang berlaku (Wihastinelahi & Erawati, 2020).

Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Wihastinelahi dan Teguh Erawati (2020)	Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa dengan Good Governance Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus di Kecamatan Panjatan)	Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif disajikan nilai maksimum, nilai minimum, mean, dan standar deviasi.	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sistem keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.
2.	Reski Amalia Perti (2020)	Pengaruh Transparansi Dan Pengawasan Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Pada Desa Paomacang)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif.	Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa dan pengawasan keuangan desa berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah desa.
3.	M. Amin (2019)	Pengaruh Kinerja Dan Pengawasan Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Transparansi Keuangan Desa Montong Betok Kabupaten Lombok Timur	Metode penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan kinerja aparatur dan pengawasan BPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan desa.
4.	Rama Linda Septian Anggrayeni, Andi Wawo dan Raodahtul Jannah (2021)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sifat Amanah Sebagai Variabel Moderasi	Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian asosiatif.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Sedangkan sifat amanah tidak dapat memoderasi pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa.

5.	Shel Ketsia Apriani Laya, Yusman Syaukat Ma'mun Sarma (2021) dan Hafzoach (2022)	Pengaruh Regulasi, Pengawasan, Kepala Desa dan Pendamping Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bogor	Metode penelitian ini merupakan metode kuantitatif yang menggunakan data berupa angka yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan skala Likert dan statistik regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel regulasi, sistem pengawasan, kepala desa serta pendamping desa berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.
6.	Muhammad Fatchuriza (2021)	Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Kemampuan Kinerja Perangkat Desa Terhadap kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang	Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Keuangan Desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa sedangkan kinerja perangkat desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.
7.	Suwanti dan Hermanto (2020)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Keuangan Pemerintah Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan kinerja keuangan pemerintah berpengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah desa.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (*library research*). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *off line* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google, dan media online lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Pemerintah atau aparat desa harus mampu menyediakan informasi yang transparansi mengenai aktivitas yang telah di laksanakan. Pemerintah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi yang di perlukan masyarakat secara relevan, akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya. Karena hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah sehingga masyarakat dapat menilai kinerja dari pemerintah itu sendiri (Anggrayeni et al., 2021).

Transparansi melalui pemerintah desa mengungkapkan tentang informasi keuangan dan non-keuangan kepada masyarakat melalui media secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan sesuai dengan haknya. Ketika transparansi meningkat maka kinerja pemerintah desa juga meningkat. Jadi jika pemerintah desa ingin meningkatkan kinerjanya maka harus meningkatkan transparansinya. Penelitian sejalan dengan yang dilakukan Purti (2020), Amin (2019), Anggrayeni et al., (2021), dan Suwanti & Hermanto (2020), menyimpulkan bahwa transparansi pengelolaa keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

Pengaruh Temuan Inspektorat terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Temuan inspektorat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Inspektorat daerah sangat berperan penting sebagai *leading institution* dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa. Pengawasan keuangan desa dapat mendorong pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja yang tinggi, serta pembangunan nasional berjalan sebagaimana mestinya, termasuk pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dalam mengembangkan kreativitas daerah, dan sumber dayanya demi mendorong pertumbuhan ekonomi (Laya et al., 2021).

Menurut Amin (2019), semakin baik pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat, maka kualitas terhadap kinerja pemerintah desa akan semakin tinggi. Penelitian sejalan dengan yang dilakukan Purti (2020), Amin (2019), Laya et al., (2021), menyimpulkan bahwa pengawasan oleh inspektorat/temuan inspektorat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Menurut Fatchuriza (2020), Agar kinerja perangkat desa dalam pengelolaan keuangan ditingkat desa dapat dikelola dengan baik berdasarkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan teknologi yang baik sehingga kinerja instansi pemerintah dapat bernilai baik. Sedangkan dalam hal teknologi dalam administrasi keuangan desa saat ini menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Awal mulanya sistem tata Penerapan Sistem keuangan desa ini sangat penting karena dapat membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien.

Menurut Sulina et al., (2017), semakin baik penggunaan sistem keuangan desa maka akan semakin baik kinerja pemerintah desa. Dengan adanya sistem keuangan desa tersebut telah membantu kinerja pemerintah desa, dimana pekerjaan lebih terencana dan terarah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Penelitian sejalan dengan yang dilakukan Fatchuriza (2020) dan Wihastinelahi & Erawati (2020), menyimpulkan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi pengelolaan keuangan, temuan inspektorat dan sistem keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa, selain dari pengelolaan keuangan, temuan inspektorat dan sistem keuangan desa. Oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat memepengaruhi kinerja pemerintah desa selain yang faktor yang diteliti pada arikel ini. Faktor lain tersebut seperti regulasi, akuntabilitas dan kemampuan kinerja perangkat desa.

DAFTAR REFERENSI

- Amin, M. (2019). Pengaruh Kinerja dan Pengawasan Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Transparansi Keuangan Desa Montong Betok Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(2), 71–80.
- Anggrayeni, R. L. S., Wawo, A., & Jannah, R. (2021). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sifat Amanah Sebagai Variabel Moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(2), 179–193. <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i2.25485>
- Annisaningrum. (2015). *Akuntabilitas dan Transparasi Dalam Laporan Keuangan*.
- Artini, M. B., Diatmika, P. G., & Prayudi, M. A. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kemampuan Kerja dan Pengawasan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Seririt). *Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Fatchuriza, M. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Kemampuan Kinerja Perangkat Desa Terhadap kinerja Pemerintah Desa Di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 7(1), 87–99.
- Kautsar, M., Andira, M., & Rahman, B. (2017). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Peningkatan Kinerja Pengelolaan Paja Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara (DPKAD) Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 2, 2–13.
- Kushartiningsih, R., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1–18.
- Laya, K. A., Syaikat, Y., & Sarma, M. (2021). Pengaruh Regulasi, Pengawasan, Kepala Desa dan Pendamping Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bogor. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 9(1), 330–345.
- Novitasari, & Asyik, N. F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparansi, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(9), 1–16.
- Pontas, R. S. (2014). *Pengelolaan SDM dalam Rangka Penerapan Good Corporate Governance*.
- Purti, R. A. (2020). Transparansi Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Pada Desa Paomacang) *Publikasi Ilmiah*.
- Sulina, I. G., Wahyuni, M., & Kurniawan, P. (2017). Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). *Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(2).

- Suwanti, S., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Keuangan Pemerintah Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(8), 1–21.
- Wihastinelahi, W., & Erawati, T. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dengan *Good Governance* Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus di Kecamatan Panjatan). *Journal Competency of Business*, 4(2), 77–94. <https://doi.org/10.47200/jcob.v4i2.702>